

# DIURGENSI PENINGKATAN PEMANFAATAN PELABUHAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

**Medi Nopiana**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361  
Email: medinopiana@gmail.com

**Diterima 3 Juli 2017**

**Disetujui 28 Juli 2017**

## ABSTRAK

Kajian ini membahas secara menyeluruh tentang berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi di atas. Selain itu, kajian ini akan membahas pula kondisi Pelabuhan Tapaktuan saat ini serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan rangka meningkatkan kemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan. Metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif, dengan berdasarkan serangkaian metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Peningkatan pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya tidak berfungsinya Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan dan akumulasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu, perlunya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan konsisten menerapkan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan, serta menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan perdagangan (*ships follow the trade*) dan menumbuhkan daerah yang kurang berkembang (*ships promote the trade*).

**Kata kunci:** Pelabuhan Tapaktuan, Potensi Wilayah, Kabupaten Aceh Selatan

## ABSTRACT

*This review discusses the potential of South Aceh Regency generated by the economic sectors above. In addition, this study will discuss the current condition of Tapaktuan Port as well as the direction of development policy of South Aceh Regency to improve the utilization of Tapaktuan Port. The method of analysis in this research uses descriptive method, based on a series of data collection methods through literature study, observation and interview. Increased utilization of Tapaktuan Port still faces a number of challenges, including the non-functioning of Tapaktuan as a center of growth and economic accumulation of South Aceh Regency. Therefore, the need for the South Aceh Regency Government to consistently implement policies concerning the utilization of Tapaktuan Port, as well as create strong synergy between the government of South Aceh district with the central government in order to develop trade (ships follow the trade) and grow the less developed areas (ships promote the trade).*

**Keywords:** Tapaktuan Port, Regional Potential, Aceh Selatan Regency

## PENDAHULUAN

Dalam sistem transportasi secara keseluruhan, pelabuhan adalah prasarana perhubungan laut yang digunakan kapal-kapal laut untuk berlabuh sekaligus sebagai titik peralihan dari sistem transportasi darat ke sistem transportasi laut dan sebaliknya (Odo, 2000). Pelabuhan berperan merangsang pertumbuhan kegiatan industri, perdagangan dan kegiatan ekonomi dari wilayah yang dilayani (Siregar, 2012). Oleh karena

itu, aktivitas pelabuhan tidak dapat dipisahkan dengan daerah belakang (*hinterland*).

Pelabuhan Tapaktuan sebagai salah satu pelabuhan penting di Provinsi Aceh, perlu mendapat perhatian mengingat besarnya potensi wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai *hinterland*. Berbagai potensi tersebut berupa hasil produksi sektor pertanian pangan, perikanan (tangkap maupun budidaya), perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata.

Pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan dapat ditingkatkan dari saat ini hanya tempat kapal bersandar atau singgah menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi seperti proses penyimpanan, distribusi, pengolahan dan pemasaran.

Kajian ini akan membahas secara menyeluruh tentang berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi di atas. Selain itu, kajian ini akan membahas pula kondisi Pelabuhan Tapaktuan saat ini serta arah kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan Pelabuhan Tapaktuan. Metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif, dengan berdasarkan serangkaian metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mendorong akselerasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan.

## TINJAUAN TEORITIS KEPELABUHAN

Pelabuhan berfungsi sebagai titik simpul antara moda air dengan moda darat. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai dalam rangka penyelenggaraan perpindahan barang/penumpang, dari tempat asal ke tujuan akhir dari barang/penumpang yang memerlukan paling tidak dua jenis moda transportasi yang berbeda. Saat ini, pelabuhan juga dipandang sebagai bagian dari kegiatan logistik (Kementerian Perhubungan, 2016).

Senada dengan pernyataan di atas, Siregar (2012) menjelaskan masalah kepelabuhanan menyangkut hubungan antara kapal, muatan dan jasa pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai penyedia berbagai jasa bagi kapal dan muatan agar terjamin kelancaran pelayaran. Kapal memerlukan tempat bersandar dan berbagai pelayanan selama berada di pelabuhan dan untuk melanjutkan pelayarannya. Kapal memerlukan alur dan dermaga untuk merapat ke pelabuhan dan bertambat. Selain itu, kapal memerlukan fasilitas untuk memperlancar aliran barang dan penumpang melalui pelabuhan. Fasilitas tersebut antara lain berupa alat-alat bongkar muat, gudang, lapangan penumpukan, moda transportasi lain (seperti truk atau kereta api) dan perkantoran (untuk bea dan cukai, imigrasi dan karantina).

Sementara itu, keberadaan pelabuhan di suatu daerah akan menumbuh-kembangkan kegiatan perdagangan di daerah yang bersangkutan (Kementerian Perhubungan, 2016). Simbolon (2003) mengungkapkan bahwa terdapat ungkapan *ship follow the trade and trade follow the ship*.

Kata *ship follow the trade* mengandung makna bahwa transportasi (*ship*) mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktivitas perdagangan. Dan kata *trade follow the ship* berarti pula bahwa perkembangan kegiatan perdagangan tergantung pada transportasi (*ship*). Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pelabuhan sebagai bagian dari keseluruhan sistem transportasi dan aktivitas perdagangan/ekonomi suatu daerah saling memengaruhi satu dengan yang lainnya.

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KEPELABUHANAN

Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016. Regulasi tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 pada intinya menguraikan beberapa hal, yaitu:

- Kebijakan pelabuhan nasional dan strategi implementasinya disertai uraian mengenai rencana aksi di bidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan;
- Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan dan implikasinya terhadap pembangunan kepelabuhanan di Indonesia;
- Hierarki, lokasi dan rencana pembangunan pelabuhan.

Kebijakan Kepelabuhanan nasional khususnya pada pelabuhan utama, akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dengan sistem operasi pelabuhan sesuai standar internasional, baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya mendorong investasi swasta dan persaingan, pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan, terwujudnya integrasi perencanaan, menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin,

meningkatkan perlindungan maritim dan mengembangkan sumber daya manusia.

Untuk menjalankan salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (Nawacita), yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, akan diwujudkan dengan program Tol Laut. Program tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan angkutan laut, yang menghubungkan wilayah Indonesia yang sudah maju dan wilayah Indonesia yang belum maju atau tertinggal, termasuk daerah perbatasan, secara tetap dan teratur (berjadual).

Regulasi tersebut menguraikan pula peran pelabuhan dalam pengembangan pariwisata melalui dukungan aksesibilitas terhadap 10 (sepuluh) destinasi wisata di Indonesia. Di antaranya, Destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Danau Tigaras, Simanido, Muara, Sipingan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onanrunggu, dan Balige dan destinasi wisata Tanjung Lesung dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor dan Merak. Selain itu, untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberangan internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia), dan Bitung – General Santos (Filipina).

Dalam RIPN tersebut, beberapa pengembangan yang termasuk dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara; pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kalimantan Timur; pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara); pembangunan Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta; Makassar *New Port*, Sulawesi Selatan; pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai, Maluku Utara; pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah; pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi, Sulawesi Tengah; dan pengembangan Pelabuhan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

## KAJIAN KEPELABUHAN TERDAHULU

Kajian pemanfaatan dan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia telah banyak dilakukan oleh akademisi dan peneliti yang berasal dari pemerintah atau nonpemerintah. Kajian tersebut antara lain dilakukan oleh Amar (2000), yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan Pelabuhan Donggala serta melihat kemungkinan peningkatan fungsinya dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Donggala selaku *hinterland*. Analisis kajian menggunakan penilaian terhadap kondisi sistem pelabuhan, potensi dan prospek pengembangan wilayah di Kabupaten Donggala, serta penilaian terhadap kondisi dan karakteristik Pelabuhan Donggala. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa peningkatan fungsi Pelabuhan Donggala dapat ditingkatkan dari pelabuhan yang hanya terfokus pada kegiatan interinsuler menjadi pelabuhan yang melayani berbagai kegiatan kepelabuhanan lainnya, seperti: pelabuhan komersial, industri, perikanan, wisata maupun sebagai pelabuhan penumpang yang melayani interaksi dengan wilayah sekitarnya. Peningkatan fungsi tersebut harus disertai dengan peningkatan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.

Kajian serupa juga dilakukan Heribertus Odo (2001) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kemungkinan kebutuhan peningkatan pemanfaatan pelabuhan Wini, dan perkembangan kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode analisis kajian menggunakan analisis kebutuhan peningkatan pemanfaatan pelabuhan Wini, perbandingan kemampuan fasilitas pelabuhan Tenau, Atapupu dan Wini serta analisis pelabuhan Wini dikaitkan dengan jaringan jalan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil kajian menunjukkan perlu adanya peningkatan pemanfaatan pelabuhan Wini melalui pemusatan volume bongkar muat yang berasal dari dan ke wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kajian ini merekomendasikan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada empat ruas jalan penunjang pelabuhan Wini dan pembangunan gudang tertutup sebagai tempat penampungan sementara komoditi ekspor-impor.

Kajian lain dilakukan oleh Sigalingging (2007), yang berusaha mengungkap hubungan antara pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahanan wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam program Tapanuli *Growth*. Metode penelitian menggunakan

metode survei dan observasi, bertujuan untuk menjangkau persepsi kalangan masyarakat dan pemerintah dengan teknik simple random sampling. Hasil kajian menunjukkan peran/keberadaan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah walaupun berhubungan positif, namun memiliki korelasi yang lemah dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan daerah. Kajian ini menyimpulkan bahwa program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Tapanuli *Growth* yang melakukan pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah Tapanuli Tengah adalah sudah tepat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi dalam hal peningkatan ketahanan wilayah, program tersebut belum mempunyai pengaruh yang signifikan, sehingga masih memerlukan peran dari pemerintahan pusat.

Kajian Zulfan (2008) berupaya menemukan jawaban tentang dampak pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa Nanggroe Aceh Darussalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, tingkat pendidikan dan kesehatan serta faktor

keamanan. Metode penelitian menggunakan metode survei, dengan metode analisis statistik komparatif. Sementara itu, teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified random sampling*. Hasil kajian menyimpulkan pengembangan pelabuhan Kuala Langsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dari segi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

### GAMBARAN POTENSI WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN SEBAGAI HINTERLAND PELABUHAN TAPAKTUAN

Berdasarkan hasil kajian dan sumber-sumber informasi yang disampaikan oleh berbagai institusi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, potensi wilayah Kabupaten Aceh Selatan dipetakan berdasarkan sektor ekonomi. Berbagai potensi tersebut tersebar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan (termasuk kelautan, pertambangan dan pariwisata).

#### Pertanian

Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Selatan menghasilkan berbagai tanaman pangan, meliputi padi dan palawija. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

**Tabel 1 : Luas Tanam dan Panen Tanaman Pangan dan Palawija Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2015**

Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Padi	15.185	14.841	75.626,80
Jagung	8.596	8.986	53.916,20
Kedelai	Tidak ada data	815	1.047,95
Kacang Tanah	Tidak ada data	232	328,70
Ubi Kayu	Tidak ada data	89	682,00
Ubi Jalar	Tidak ada data	68	397,80
Kacang Hijau	Tidak ada data	26	32,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Luas padi (baik padi sawah maupun padi ladang) pada tahun 2015 mencapai 15.185 ha, dengan luas panen mencapai 14.841 ha. Jumlah produksi padi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 75.626,80 ton pada tahun yang sama. Sementara itu, produksi tanaman palawija tertinggi dihasilkan dari komoditi jagung dan kedelai, yang masing-masing mencapai 53.916,20 ton dan 1.047,95 ton pada tahun 2015.

#### Perkebunan

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Aceh Selatan dikenal sebagai penghasil pala. Tanaman pala merupakan salah satu komoditi andalan sektor perkebunan di kabupaten ini. Hal tersebut dibuktikan dengan total luas tanam yang terbesar dibanding tanaman lainnya, dengan mencapai 15.821 ha pada tahun 2015. Luas tanam pala paling banyak terdapat di Kecamatan Meukek

dan Tapaktuan, masing-masing mencapai 3.785 ha dan 2.177 ha. Sementara itu, jumlah produksi pala pada tahun tersebut mencapai 6.614 ton, dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 20.401 kepala keluarga (KK). Kecamatan Meukek dan Tapaktuan merupakan penghasil pala terbesar di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu masing-masing mencapai 2.082 ton dan 1.022 ton.

Komoditi andalan sektor perkebunan Kabupaten Aceh Selatan lainnya adalah kelapa sawit dengan total luas tanam mencapai 8.446 ha dan total produksi sebanyak 53.698 ton pada tahun 2015. Jumlah petani yang terlibat sebanyak 7.213 KK. Produksi dan luas tanam kelapa sawit terbesar berada di Kecamatan Trumon Timur, dengan produksi mencapai 10.820 ton dari 1.429 ha luas yang ditanam.

**Tabel 2 : Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2015**

Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
Karet	1.239	258	1.809
Kelapa Dalam	7.196	2.940	12.267
Kelapa Sawit	8.471	53.698	7.213
Kopi	1.470	343	3.686
Cengkeh	1.187	4,68	2.838
Pala	15.821	6.614	20.401
Pinang	1.672	487	5.065
Kapuk/Randu	200	20,90	1.109
Kakao	1.566	219,82	3.055
Kemiri	351	51	1.256
Sagu	230	131	1.206
Cassiavera	129	12,15	697
Nilam	174	20,70	1.434
Tebu	22	4,35	377
<b>Jumlah</b>	<b>39.728</b>	<b>64.804,60</b>	<b>-</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

### Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu sektor ekonomi yang banyak dikembangkan dan dibudidayakan oleh penduduk Kabupaten Aceh Selatan. Selain ternak kecil, jenis usaha ternak besar juga telah tumbuh dengan baik. Hasil ternak besar ini, di samping dikonsumsi sendiri oleh masyarakat kabupaten ini, juga disalurkan ke luar daerah. Dalam kurun tahun 2013-2015, jumlah

produksi ternak besar cenderung fluktuatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah produksi ternak besar yang paling banyak dihasilkan berasal dari jenis ternak kerbau dengan jumlah mencapai 70.075,36 kilogram pada tahun 2015. Jumlah produksi terbesar kedua berasal dari ternak kambing sebanyak 35.464,50 kilogram pada tahun yang sama.

**Tabel 3 : Jumlah Produksi Peternakan (kilogram) di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2015**

No.	Jenis Ternak	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Sapi Potong	12.578,80	12.689,10	12.699,10
2.	Kerbau	71.031,20	68.554,26	70.075,36
3.	Kambing	36.282,20	58.018,34	35.464,50
4.	Domba	3.570,00	2.543,65	5.773,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Budidaya peternakan di Kabupaten Aceh Selatan sangat dipengaruhi oleh potensi areal sebagai sumber pakan, air serta lingkungan yang menjamin terbebasnya dari serangan hama dan binatang buas. Usaha peternakan di Kabupaten Aceh Selatan belum banyak mengarah pada kegiatan yang bersifat komersial, namun lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya modal dan keterampilan masyarakat dalam usaha peternakan, selain sulitnya dalam penyediaan pakan.

### Kelautan dan Perikanan

Perairan laut Aceh Selatan merupakan bagian dari Samudera Hindia dengan panjang garis pantai mencapai 140 km, memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan melimpah. Hal ini dikarenakan kabupaten ini merupakan jalur migrasi ikan Tuna, serta salah satu pusat konsentrasi ikan

Cakalang, Tongkol, Tuna dan beberapa jenis ikan ekonomis lainnya seperti Tenggiri, Bawal, Kuwe, serta Udang. Di samping itu, perairan laut Aceh Selatan juga mempunyai potensi yang cukup baik untuk budidaya ikan dan rumput laut. Berbagai potensi di atas belum diusahakan secara optimal, antara lain disebabkan karena keterbatasan armada perikanan dan kemampuan nelayan. Sebagian besar nelayan masih melakukan eksploitasi secara tradisional, dengan keterbatasan dalam penguasaan modal dan teknologi, baik di bidang penangkapan maupun budidaya laut.

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, produksi Perikanan Tangkap tahun 2012 yang berasal dari hasil usaha perikanan tangkap tercatat sebesar 12,401.14 ton. Jumlah produksi tersebut meningkat dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 247,10 ton atau sebesar 2,03%.

**Tabel 4 : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap per Kecamatan Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Produksi (ton)
1.	Labuhan Haji Barat	792,00
2.	Labuhan Haji	3.462,00
3.	Labuhan Haji Timur	94,50
4.	Meukek	6.429,60
5.	Sawang	11.044,20
6.	Samadua	326,95
7.	Tapaktuan	1.120,80
8.	Pasie Raja	657,00
9.	Kluet Utara	237,30
10.	Kluet Selatan	215,50
11.	Bakongan	4.380,20
12.	Bakongan Timur	863,70
13.	Trumon	278,10
<b>Jumlah</b>		<b>29.901,85</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan

Selain itu, potensi areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh Selatan juga cukup besar baik budidaya ikan di kolam, tambak, perairan umum maupun budidaya ikan sistem minapadi. Secara keseluruhan, potensi budidaya ikan air tawar diperkirakan seluas 20.156 ha. Potensi tersebut terdiri dari budidaya ikan di kolam seluas 10.000 ha, budidaya ikan di perairan umum seluas 1.671 ha, dan budidaya ikan dengan sistem minapadi seluas 8.485 ha. Namun yang sudah dimanfaatkan baru mencapai 48,67 ha dengan produksi sebesar 265,97 ton/tahun.

Potensi pengembangan budidaya air payau (tambak) mencapai 4.000 Ha yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Trumon,

Bakongan, Kluet Utara, Kluet Selatan, Pasie Raja, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji, dan Samadua. Namun demikian yang telah diusahakan oleh masyarakat baru seluas 17,50 Ha dari potensi lahan yang ada dengan tingkat penerapan teknologi sederhana dengan produksi hanya 5,75 ton (Kabupaten Aceh Selatan, 2015b).

### Pertambangan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Kabupaten Aceh Selatan, 2014), kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

- Potensi pertambangan Emas di Labuhan Haji Timur, Kluet Tengah, Pasieraja, Sawang, Meukek dan Samadua;

- Potensi pertambangan Bijih Besi di Trumon Tengah, Kluet Tengah, Trumon Timur, Meukek, Sawang dan Pasieraja;
- Potensi pertambangan Galena/Timah Hitam di Bakongan dan Kota Bahagia;
- Potensi pertambangan Batubara di Pasieraja dan Tapaktuan.

### Pariwisata

Selain sektor-sektor di atas, potensi lain yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan adalah sektor pariwisata. Banyak dan beragamnya objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa potensi pariwisata di kabupaten ini tidak kalah dengan daerah yang sektor pariwisatanya telah berkembang. Berikut obyek atau tempat wisata di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan

**Tabel 5 : Nama-nama Tempat Wisata, serta Jaraknya dari Ibu Kota Kecamatan dan dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Tempat Wisata per Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1.	TRUMON		
	a. Pantai Trumon	1 Km	110 Km
	b. Pulau Trumon	5 Km	114 Km
	c. Mesjid Tua/Makam Raja	0,5 Km	109,5 Km
	d. Gunung Pinto Angen	8 Km	117 Km
	e. Pantai Calok Bate	7 Km	116 Km
	f. Alam Trumon	1,5 Km	109 Km
	g. Benteng Kuta Bate Desa Keude	0,5 Km	109,5 Km
	h. Komplek Rumah Raja Trumon	3 Km	112 Km
	i. Batu Bertulis/Batu Bersurat Desa Pantan Bili	7 Km	116 Km
	j. Kuburan Nek Raya Batee Dese Kuta Tua	3 Km	112 Km
	k. Lapangan Terbang Peninggalan Jepang	1 Km	110 Km
2.	TRUMON TIMUR		
	a. Pantai Ie Mirah	4,5 Km	117,5 Km
	b. Gunung Tengku	6 Km	120 Km
	c. Makam Tengku	8 Km	122 Km
3.	TRUMON TENGAH		
	a. Makam Kuburan Syahid di G. Kapur	7 Km	116 Km
4.	BAKONGAN		
	a. Pantai Ujung Pulo Cut	6 Km	66 Km
	b. Pulau Dua	3 Km	57 Km
	c. Pantai Ujung Mangki	3 Km	57 Km
	d. Pantai Ujung Kareung	4 Km	56 Km
	e. Makam Teuku Raja Angkasah	5,5 Km	65,5 Km
	f. Pantai Ie Hitam	1 Km	61 Km
5.	BAKONGAN TIMUR		
	a. Irigasi/Air Terjun Simpang Seubadeh	5 Km	76 Km
	b. Pantai Lhok Jamin Seubadeh	3 Km	68 Km
	c. Air Terjun/Sungai Seulekat Seubadeh	4 Km	75 Km
	d. Kuburan Panjang	4 Km	75 Km
6.	KOTA BAHAGIA		
	a. Danau Laut Bangko	12 Km	72 Km
	b. Pemandian Irigasi Beutong	1 Km	32 Km

No.	Tempat Wisata per Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten
7.	KLUET SELATAN		
	a. Makam Teuku Cut Ali	0,5 Km	31,5Km
	b. Pantai Cemara Lubuk Sipuru	1 Km	32 Km
	c. Hutan Lindung	6 Km	37 Km
	d. Pantai Rantau Sialang	15 Km	46 Km
	e. Ujung Gunung Kalam Baluh Gelumbuk	3 Km	34 Km
8.	KLUET TIMUR		
	a. Irigasi Paya Dapur	3 Km	38 Km
	b. Gunung Sikorong	3 Km	38 Km
	c. Makam Tgk. Panglima Raja Lelo	1 Km	36 Km
	d. Makam Badan T Cut Ali Alur Muarang	10 Km	45 Km
	e. Batu Putri Alur Muarang	10 Km	45 Km
	f. Tapak Aulia	6 Km	41 Km
	g. Air Terjun Simpali	8 Km	43 Km
9.	KLUET UTARA		
	a. Makam Abuya Syech H. Jailani Musa	0,5 Km	28,5 Km
	b. Pesantren Darul Rahmah	0,5 Km	28,5 Km
	c. Pesantren Simpang Tiga	2 Km	29 Km
	d. Pantai Darussa'dah	0,5 Km	28,5 Km
	e. Kubah/Makam	5 Km	33 Km
	f. Mesjid Tua/Kuta Pulo Kameng	3 Km	31 Km
	g. Pantai Kuala Ba'u	5 Km	33 Km
10.	PASIE RAJA		
	a. Batee Goa Pantan Bili	3 Km	18 Km
	b. Pasie Ladang Tuha	1 Km	16 Km
	c. Pucok Krueng	3 Km	18 Km
	d. Pantai Pasir Rasian Lancang	6 Km	21 Km
11.	KLUET TENGAH		
	a. Irigasi Gunong Pudong	12 Km	51 Km
	b. Muara Simpali	8 Km	48 Km
	c. Batu Hampa	6 Km	46 Km
	d. Batu Sumbang	8 Km	48 Km
	e. Alue Keujrun	15 Km	55 Km
	f. Damar Buih	20 Km	60 Km
12.	TAPAKTUAN		
	a. Gunung Lampu	1 Km	1 Km
	b. Makam, Tapak, Tongkat, & Topi Tuan Tapa	0.5 Km	0.5 Km
	c. Pantai Lhok Rukam	7 Km	7.5 Km
	d. Air Terjun Tingkat Tujuh	4 Km	5.5 Km
	e. Pantai Batu Mereh	2 Km	2,5 Km
13.	TAPAKTUAN		
	a. Pantai Rindu Alam	2 Km	1 Km
	b. Gua Kalam	4,5 Km	5,5 Km
	c. Panorama Hatta	7 Km	8 Km
	d. Pasir Setumpuk Lhok Rukam	7,5 Km	9 Km
	e. Kolam Renang Aroya	1 Km	1,5 Km

No.	Tempat Wisata per Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten
	f. Mesjid Tuo	0,5 Km	1 Km
	g. Bungker Jepang Kelurahan Hilir	0,5 Km	0,5 Km
	h. Bevak Belanda Panton Luas	5 Km	6 Km
	i. Lubuk Simerah	1 Km	2 Km
14.	SAMADUA		
	a. Batu Berlayar	3 Km	13 Km
	b. Sungai Sekabu	5 Km	15 Km
	c. Sungai Lubuk Layu	4 Km	13 Km
	d. Pantai Pasir Putih	6 Km	16 Km
	e. Batu Sumbang	3,5 Km	13,5 Km
15.	SAWANG		
	a. Pantai Pasi Tuan Hilang	1,5 Km	23,5 Km
	b. Air Terjun Tuwi Lhok	5 Km	17 Km
	c. Pulau Ujung Serudung	6 Km	28 Km
	d. Sungai Trieng Meuduro	6 Km	28 Km
	e. Air Terjun Air Dingin	7 Km	17 Km
16.	MEUKEK		
	a. Pantai Lhok Aman	6,5 Km	41,5 Km
	b. Pantai Lhok Bengkuang	2 Km	37 Km
	c. Air Terjun Ceuraceu	3 Km	38 Km
17.	LABUHAN HAJI		
	a. Makam Abuya Syech H. Muda Waly Al-Khalidy	5 Km	47 Km
	b. Sulok Pasantren Darussalam	5 Km	47 Km
	c. Gou Kelongsong	2 Km	49 Km
	d. Sungai Pagar Gantung	4 Km	49 Km
	e. Pantai Ujung	2 Km	49 Km
	f. Kitab Al-Qur'an Kampung Dalam	1 Km	48 Km
	g. Pelabuhan Penyeberangan Antar Pulau	0,5 Km	47,5 Km
	h. Kolam Air Sejuk	0,5 Km	47,5 Km
	i. Pantai Gosong/Gosong Gila	1 Km	48 Km
	j. Goa Panjang	1,5 Km	48,5 Km
18.	LABUHAN HAJI TIMUR		
	a. Pantai Batu Meletus	2 Km	45 Km
	b. Sungai Batu Berhujan	5 Km	48 Km
	c. Pantai Sawang Biduk Buruk/Sawang Indah	2 Km	45 Km
	d. Pantai Batu Bermenung	1,5 Km	44,5 Km
	e. MakamTgk. Keuramat Peulumat	2,5 Km	45,5 Km
19.	LABUHAN HAJI BARAT		
	a. Sunagi Kreung Baru	2,5 Km	53,5 Km
	b. Kuburan Syahid	3 Km	54 Km
	c. Gua Batu Sicanang	3 Km	57 Km

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

## POSISI PELABUHAN TAPAKTUAN DALAM KEBIJAKAN KEPELABUHANAN NASIONAL

Pelabuhan Tapaktuan merupakan salah satu pelabuhan di Provinsi Aceh yang masuk ke dalam rencana pengembangan pelabuhan nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pengembangan Pelabuhan Tapaktuan dapat dilihat dengan ditingkatkannya hierarki pelabuhan tersebut menjadi Pelabuhan Pengumpul sejak tahun 2015. Dengan demikian, pelabuhan tersebut telah menjadi pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Keberadaan Pelabuhan Tapaktuan akan didukung Pelabuhan Meukek dan Labuhan Haji sebagai Pelabuhan Pengumpulan Lokal. Hal tersebut sesuai dengan rencana lokasi pelabuhan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KP 901 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpulan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut, harus sesuai dengan:

- rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- potensi sumber daya alam; dan
- perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Selain itu juga harus berpedoman pada:

- tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
- jarak dengan pelabuhan pengumpulan lainnya;
- luas daratan dan perairan;
- pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
- kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

**Tabel 6 : Lokasi Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Angkutan Laut**

No.	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
			2011	2015	2020	2030
1.	Aceh Barat	Meulaboh	PP	PP	PP	PP
2.	Aceh Barat Daya	Susoh	PR	PR	PR	PR
3.	Aceh Besar	Malahayati	PP	PP	PP	PP
4.	Aceh Jaya	Calang	PP	PP	PP	PP
5.	Aceh Selatan	Tapaktuan	PR	PP	PP	PP
6.	Aceh Singkil	Singkil	PP	PP	PP	PP
7.	Aceh Timur	Idi	PL	PL	PL	PL
8.	Aceh Utara	Lhokseumawe/Kreung Geukeh	PP	PP	PP	PP
9.	Langsa	Kuala Langsa	PP	PP	PP	PP
10.	Sabang	Sabang	PU	PU	PU	PU
11.	Simeulue	Sinabang	PP	PP	PP	PP

Keterangan : PU = Pelabuhan Utama, PP = Pelabuhan Pengumpul, PR = Pelabuhan Pengumpulan Regional, PL = Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

## KONDISI PELABUHAN TAPAKTUAN SAAT INI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas Pelabuhan Tapaktuan saat ini hanya dimanfaatkan sebagai jalur distribusi semen dari Padang, Sumatera Barat. Barang tersebut dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar di empat wilayah

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Kegiatan bongkar semen setiap bulannya di pelabuhan ini mencapai 15 ribu ton.

Pelabuhan yang secara geografis terletak pada koordinat  $3^{\circ} - 15' - 00''$  Lintang Utara dan  $97^{\circ} - 11' - 00''$  Bujur Timur ini telah memiliki

berbagai fasilitas pelabuhan yang memadai, seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan, *trestle*, *cause way*, pusat pelayanan informasi, kantor, pos penjagaan dan *workshop*. Namun demikian fasilitas pelabuhan yang ada belum sepenuhnya dapat menampung kegiatan arus barang dalam skala yang lebih besar. Di sisi lain, rendahnya aktivitas perdagangan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan Tapaktuan disadari telah menjadi salah satu permasalahan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan 2013-2018.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyusun arah kebijakan pembangunan yang melibatkan keberadaan Pelabuhan Tapaktuan. Dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) 2008-2028, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyusun arah kebijakan umum pembangunan di bidang ekonomi antara lain mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Tapaktuan, melalui kerja sama yang baik dengan para investor, pengusaha angkutan laut, Pelindo maupun dengan pihak lain. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam arah kebijakan pada RPJM Kabupaten Aceh Selatan 2013-2018, yakni melalui peningkatan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Tapaktuan.

Pada suatu kesempatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membuat wacana akan diarahkan/dikembangkan Pelabuhan Tapaktuan menjadi pelabuhan pariwisata di masa mendatang<sup>1</sup>. Hal ini tidak lepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengarahkan Kota Tapaktuan menjadi kota wisata dan pendidikan. Alasan lain, dikarenakan posisi Pelabuhan Tapaktuan yang berada di tengah kota saat ini telah menimbulkan polusi sebagai akibat dari aktivitas bongkar muat dan pengangkutan barang. Lalu lintas truk-truk pengangkut semen yang melintasi sentra bisnis turut menambah kerumitan kota Tapaktuan. Sesuai rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, fungsi pelabuhan barang yang saat ini dilakukan oleh Pelabuhan Tapaktuan, selanjutnya akan dipindahkan ke Pelabuhan Bakongan dan Meukek.

<sup>1</sup> Berdasarkan hasil pertemuan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tapaktuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 Oktober 2014 jam 10.00 WIB, yang dihadiri oleh Bupati, Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan beserta jajarannya, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.

## PENUTUP

Besarnya potensi Kabupaten Aceh Selatan dan dukungan kebijakan dari Pemerintah seyogyanya membantu peningkatan pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan. Namun demikian peningkatan pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut di antaranya adalah tidak berfungsinya Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan dan akumulasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi ini tidak lepas dari faktor geografis Tapaktuan yang diapit langsung oleh pegunungan yang curam dan terjal serta berbatasan langsung lautan Samudera Hindia. Pada gilirannya mengakibatkan terbatasnya ketersediaan lahan untuk aktivitas ekonomi dan pemukiman, sehingga aktivitas penduduk lebih terkonsentrasi ke wilayah di luar kota Tapaktuan.

Saran kebijakan untuk pemerintah adalah perlunya konsistensi kebijakan yang menyangkut pemanfaatan Pelabuhan Tapaktuan pada tataran implementasinya. Pemerintah Aceh Selatan haruslah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan amanat RPJM yang sudah ada. Selain itu, perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menjadikan Pelabuhan Tapaktuan sebagai bagian dari program transportasi nasional, misalnya jaringan pelayaran *short sea shipping*. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan perdagangan (*ships follow the trade*) dan menumbuhkan daerah yang kurang berkembang (*ships promote the trade*).

## Ucapan Terima Kasih

Kepada Kepala Kantor UPP Kelas III Tapaktuan dan para staf serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan yang telah bersedia membantu dan mendukung penyusunan kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar. 2000. *Studi Peningkatan Fungsi Pelabuhan Donggala dalam Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Donggala*. Tesis Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung.
- Badan Pusat Statistik. berbagai edisi. *Aceh Selatan Dalam Angka*.

- Kabupaten Aceh Selatan. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028*. Tersedia pada <http://filesserver.acehselatankab.go.id/index.php?&direction=0&order=nom&directory=Publikasi%20Daerah/RPJM%20-%20RPJP>, Diakses pada tanggal 13 April 2017.
- Kabupaten Aceh Selatan, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, Tersedia pada [www.ifacs.or.id/wp-content/uploads/pdf/AcehSelatan\\_SEA.pdf](http://www.ifacs.or.id/wp-content/uploads/pdf/AcehSelatan_SEA.pdf), Diakses pada tanggal 21 Desember 2014.
- Kabupaten Aceh Selatan. 2015a. *Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018*. Tersedia pada <http://filesserver.acehselatankab.go.id/index.php?&direction=0&order=nom&directory=Publikasi%20Daerah/RPJM%20-%20RPJP>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.
- Kabupaten Aceh Selatan. 2015b. *Potensi Perikanan*. Tersedia pada <http://backup.acehselatankab.go.id/index.php/page/10/potensi-perikanan>. Diakses pada tanggal 16 April 2017.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional*. Tersedia pada [jdih.dephub.go.id/produk\\_hukum/view/UzFBZ09UQXhJRIJCU0ZWT0IESXdNVFk9](http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ09UQXhJRIJCU0ZWT0IESXdNVFk9). Diakses pada tanggal 10 April 2017.
- Kementerian Perhubungan. 2017. *Kemenhub Keluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Terbaru*. tersedia pada <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/-KEMENHUB-KELUARKAN-RENCANA-INDUK-PELABUHAN-NASIONAL-TERBARU.aspx>. diunduh pada tanggal 11 Februari 2017.
- Odo. Heribertus. 2001. *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara*. Tesis Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Tersedia pada <http://hubdat.dephub.go.id/uu/962-uu-nomor-17-tahun-2008-tentang-pelayaran>. Diakses pada tanggal 10 April 2017.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan*. Tersedia pada <http://pkps.bappenas.go.id/dokumen/uu/Uu%20Sektor/Pelayaran/PP%2061%20tahun%202009.pdf>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.
- Sigalingging. Dosman. 2007. *Hubungan Pembangunan Pelabuhan Laut dan Pengembangan Wilayah dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Ketahanan Daerah*. Tesis Program Studi Kajian Ketahanan Nasional. Fakultas Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Simbolon. Masry M.. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siregar. Muchtaruddin. 2012. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Transportasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Zulfan. 2008. *Dampak Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar*. Tesis Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Rencana Induk Pelabuhan Aceh 2013-2033*. Tersedia pada <https://id.scribd.com/document/188761204/Rencana-Induk-Pelabuhan-Aceh-2033>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.
- Website :  
<http://backup.acehselatankab.go.id>  
<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>